

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019

Ainun Ningsih Nasution^{a*}, Dwi Susilowati^b

^{a, b}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

*Corresponding author : ainunningsih99@gmail.com

Artikel Info

Article history:
Received 14 September 2021
Revised 5 Oktober 2021
Accepted 18 November 2021
Available online 29
November 2021

Keyword: *Regional Expenditure, Taxes Charges, Special Allocation Fund and Total Population*

JEL Classification
H60,H50,H40

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Retribution, Special Allocation Funds and Amount on District / City Regional Expenditure in East Nusa Tenggara Province for the period 2015 – 2019. In this study, researchers used a sampling technique whit a sampling method, amounting to 21 districts an 1 city. In this study using panel data. In this study, the fixed effect method is the best model. The results of this study are local taxes, special allocation funds and total population have a positive and significant effect on regional spending in East Nusa Tenggara Timur Province, while local charges have a positive and insignificant effect on regional spending in East Nusa Tenggara Province.

PENDAHULUAN

Reformasi pada bidang pemerintahan daerah (pemda) dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999, dengan adanya penetapan undang-undang No. 32 tahun 2004 di jelaskan mengenai pembagian serta pembentukan di negara Indonesia yang bersifat otonomi serta menerapkan desentralisasi. Otonomi daerah merupakan penyerahan pertanggung jawaban wewenang daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara keseluruhan, baik sektor keuangan maupun sektor non keuangan, penetapan disentralisasi dan otonomi di harapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dalam segala aspek dan juga di harapkan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih maju.

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan serta fasilitas publik yang memadai seperti jalan raya, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain khususnya untuk memenuhi kepentingan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang di lakukan melalui belanja daerah, untuk melakukan belanja daerah pemerintah daerah harus memiliki pendapatan daerah agar dapat mendanai segala kegiatan belanja daerah guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat, dalam pelaksanaannya pemasukan daerah serta pengeluaran daerah membutuhkan sautu rencana atau yang biasa di kelola pemerintah secara tepat namun pada kenyataannya pada belanja daerah pemerintah belum mampu berperan secara efektif sehingga perlunya peran yang lebih efektif pada komponen belanja daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya peningkatan realisasi belanja daerah di setiap tahunnya seperti pada tabel berikut.

Tabel. Data Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (2015-2019) (Dalam Jutaan Rupiah)

Belanja daerah	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Daerah	3,328,496	3,702,912	4,634,876	4,846,839	5,277,065
Belanja Tindak Langsung	2,134,863	2,494,916	3,103,130	3,232,434	3,272,862
Belanja Pegawai	596,364	644,667	1,274,601	1,299,772	1,431,820
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	1,171,350	1,472,016	1,347,982	1,481,858	1,291,513
Belanja Bantuan Sosial	20,958	10,849	21,423	19,426	29,353
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi	317,681	364,759	455,802	427,542	515,983
Belanja Bantuan Keuangan	27,460	1,476	3,265	3,711	2,702
Belanja Tidak Terduga	1,051	1,149	56	125	1,491
Belanja Langsung	1,193,633	1,207,996	1,531,747	1,614,406	2,004,202
Belanja Pegawai	-	-	-	-	11,146
Belanja Barang dan Jasa	586,931	605,697	1,048,822	1,084,644	1,194,832
Belanja Modal	606,702	602,299	482,925	529,761	798,224

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2015-2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat pada setiap tahunnya kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata mengalami peningkatan realisasi belanja daerah setiap tahunnya, untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang direncanakan provinsi Nusa Tenggara Timur agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan anggaran belanja daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan juga terjadi peningkatan kegiatan perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peningkatan belanja daerah pada tiap tahunnya mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada di daerahnya agar dapat menjadi pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai segala bentuk belanja daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien sebagai bentuk keberhasilan ditetapkannya otonomi daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang asalnya dari rekening kas umum daerah yang akan mengurangi ekuitas dana, dilakukan daerah 1 anggaran dan tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah daerah (Wulandari & Iryanie, 2018) pada penelitian ini variabel yang mempengaruhi belanja daerah yakni pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk.

Pajak daerah merupakan hasil pendapatan daerah yang dikelola pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi sebagai dana penunjang untuk penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil dari pemungutan pajak daerah, dan akan dimasukkan kedalam APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah) yang akan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan belanja daerah dalam jangka waktu satu tahun (Kurniaawan & Purwanto, 2004). Karakteristik dari pajak yakni, di pungut pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat di paksaan kepada masyarakat, tidak dapat berhubungan langsung dengan imbalan atau manfaat secara langsung,

hasil penerimaan pajak daerah di setorkan ke kas daerah, di gunakan untuk kepentingan masyarakat. Pajak di bagi menjadi dua jenis yakni pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi (Zuraida, 2013).

Menurut UU 28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin yang di sediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun suatu badan. Sifat pemungutan dari retribusi yakni, hanya diberlakukan kepada masyarakat ataupun badan yang hendak merasakan jasa yang di berikan pemerintah secara langsung, dan pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan langsung oleh pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Besarnya retribusi yang harus di bayarkan pribadi atau suatu badan yang menggunakan jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah di hitung berdasarkan perkalian dari tingkat penggunaan dan jasa dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan dari penggunaan jasa di hitung berdasarkan kuantitatif penggunaan jasa sebagian besar beban alokasi biaya di tanggung oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan sedangkan tarif retribusi merupakan presentasi tertentu untuk menghitung besarnya tarif terutang (Prakosa, 2005).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja nasional) yang diberikan pada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai segala kegiatan daerah yang bersifat khusus daerah sesuai dengan ketetapan dan prioritas nasional, tujuan dari dana alokasi khusus adalah meningkatkan sarana dan prasarana fisik, serta jua meningkatkan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Jumlah penduduk menurut BPS merupakan, jumlah semua orang yang berdomisili di Indonesia dalam rentan waktu 6 bulan atau lebih di Indonesia dengan tujuan untuk bertempat tinggal dan menetap di Indonesia, pertumbuhan penduduk terjadi berdasarkan tiga faktor yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk disuatu daerah akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah anggaran belanja daerah didaerah tersebut guna meningkatkan kualitas ekonomi didaerah tersebut (Ivoni Ika Liando & Hermanto, 2017).

Handiyani & Nuraina, (2012) judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun penelitian ini bertujuan untuk memeberikan bukti empiris pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belnja daerah kabupaten Madiun, hasil dari penelitian ini pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten madiun, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, pajak daerah dan dana aloksi khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun. Penelitian lainnya adalah Muhammad et al., (2020) judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada penelitian ini peneliti menggunakan populasi pada kabupaten Aceh yang berjumlah 23 kabupaten, dengan rentan waktu 2010-2017, www.djpk.kemenkeu.go.id jenis data pada penelitian ini merupakan data panel OTSUS berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

kabupaten/kota di provinsi Aceh. Penelitian lainnya adalah Andri et al., (2014) judul dari penelitian adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah provinsi Jambi hasil dari pengujian ini adalah PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung, sedangkan jumlah penduduk menunjukkan hasil negatif terhadap belanja langsung di provinsi Jambi. Penelitian lainnya adalah Laksono & Subowo, (2014) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah” Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah, Kesimpulan dari penelitian ini yakni pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh simultan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh pada belanja daerah, sedangkan pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian lainnya adalah Anwar & Mohammad, (2018) judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. Penelitian lainnya adalah, Hadiyanto et al., (2020) judul dari penelitian ini adalah *The Effect Of Local Taxes, Regional Retribution, and Other District Own Source Revenues On The Increase Of District Own Source Revenue* pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang periode 2011-2015, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan variabel terikat dan variabel bebas, data yang digunakan merupakan data triwulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli kota Balikpapan, Samarinda, berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Penelitian lainnya adalah Ivoni Ike Liando & Hermanto, (2017) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Flypaper Effect, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di provinsi Jawa Timur, hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan Flypaper Effect tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi antara lain adalah, bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder, data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain. Sumber data pada penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.dpjk.depkeu.go.id) dan badan pusat statistik provinsi Nusa Tenggara Timur(www.bps.nnt.go.id) . Populasi pada penilitan ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, Pada penelitian ini menggunakan metode sampling, yakni metode pengumpulan data dari suatu populasi, yang artinya pada penelitian ini menggunakan seluruh data kabupaten/kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 21 kabupaten dan 1 kota. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data panel, data panel merukapakan bentuk data gabungan dari data cross section dan data time series, data cross section pada penelitian ini menggunakan data dari 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan data time series dalam penelitian ini diperoleh dari data tahun 2015 – 2019.

Rumus Regresi Data Panel :

$$\text{Log}(Y_{it}) = \alpha + \beta_1 \log(X_{1it}) + \beta_2 \log(X_{2it}) + \beta_3 \log(X_{3it}) + \beta_4 \log(X_{4it}) + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

- α : Konstanta
- Y : Belanja Daerah
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien variabel independent
- $\log(X_{1it})$: Pajak Daerah
- $\log(X_{2it})$: Retribusi Daerah
- $\log(X_{3it})$: DAK
- $\log(X_{4it})$: Jumlah Penduduk
- t : Data Time Series (2015 – 2019)
- i : Data Cross-Section Kabupaten/Kota
- e : Tingkat Kesalahan Pengganggu

Pada pengujian dengan menggunakan metode data panel terdapat 3 (tiga) pendekatan metode yakni, *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan 3 pengujian yaitu :

1. Uji Chow

$$CHOW = \frac{(ESS1 - ESS2) / (N - 1)}{(ESS2) / (NT - N - K)} \dots \dots \dots (2)$$

- ESS1 : Residual Sun Square hasil pendugaan model *fixed effect*
- ESS2 : Residual Sun Square hasil pendugaan model *pooled last square*
- N : Jumlah Data *Cross Section*
- T : Jumlah Data *Time Series*
- K : Jumlah Variabel Penjelas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

2. Uji Hausman

$$m = (\beta - b) (M_0 - M_1)^{-1} (\beta - b) \sim X^2(K) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana β adalah vektor untuk variabel *fixed effect*, b adalah vektor variabel *random effect*, M_0 merupakan matrik kovarians untuk dugaan *random effect*.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hipotesa sebagai berikut :

H_0 = Model *Fixed Effect*

H_1 = Model *Random Effect*

3. Uji Lagrange Multiplier

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_i^n = [\sum_{t=1}^T e_{it}]}{\sum_i^n = [\sum_{t=1}^T e_{it}^2]} - 1 \right]^2 \dots \dots \dots (4)$$

n : Jumlah individu

T : Jumlah periode waktu

e : Residual metode *Common Effect* (OLS)

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Random Effect*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang terletak pada 80-120 lintang selatan dan 1180-1250 bujur timur, provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas Wilayah Utara-Laut Flores, Selatan-Samudera Hindia, Timur-Negara Timur Leste, Barat-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 6 pulau, 21 kabupaten dan 1 kota. Pulau Sumba terdiri atas, kabupaten Sumba Barat, kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, kabupaten Sumba Tengah. Pulau Timor terdiri dari, kota Kupang, kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, kabupaten Belu, kabupaten Malaka, dan kabupaten Kupang. Pulau Flores terdiri dari, kabupaten Flores Timur, kabupaten sikka, kabupaten Ende, kabupaten Ngada, kabupaten Nagekeo, kabupaten Manggarai, kabupaten Manggarai Barat, kabupaten Manggarai Timur. Pulau Alor terdiri dari kabupaten Alor, pulau Lembata terdiri dari kabupaten Lembata, pulau Rote terdiri dari kabupaten Rotendao, pulau Sabu terdiri dari kabupaten Sabu raja.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Effects Test	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.349582	(21,84)	0.0000
Cross-section Chi-square	203.111468	21	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian dari *Likelihood Ratio Test* (Uji Chow) dari hasil pada tabel regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section F sebesar 0.0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 dengan kata lain model *Fixed*

Effect lebih sesuai.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.348362	4	0.0007

Berdasarkan hasil pengujian Uji Hausman dari hasil pada tabel regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0007 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 dengan kata lain model *Fixed Effect* lebih sesuai. Berdasarkan hasil dari kedua uji pemelihan model terbaik yakni Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan hasil bahwa model *Fixed Effect* merupakan model terbaik, maka tidak perlu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil analisis dari pemilhan model regresi terbaik dengan menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman*, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Model *Fixed Effect* merupakan model terbaik, dan akan digunakan pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil analisis regresi data panel Metode *Fixed Effect* yang diolaha menggunakan Eviews 9 yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	7.345655	0.554655	13.24364	0.0000
(X1)	0.160952	0.018066	8.909258	0.0000
(X2)	0.012539	0.015171	0.826518	0.4109
(X3)	0.212909	0.012710	16.75064	0.0000
(X4)	0.178226	0.046858	3.803542	0.0003
R-Squared	0.980407	Mean dependent var		18.84968
F-statistic	168.1334	Durbin-Watson stat		2.239097
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil dari pengujian regresi data panel *Fixed Effect* dapat diketahui persamaan *Fixed Effect* adalah sebagai berikut : $Belanja_{daerah\ it} = 7.345655 + 0.160952 \text{ Log}X1_{it} + 0.012539 \text{ Log}X2_{it} + 0.212909 \text{ Log}X3_{it} + 0.178226 \text{ Log}X4_{it} + eit.$

Tabel 5. Perhitungan Intersep Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Daerah	Intersep	Nama Daerah	Intersep
Kab. Alor	0.121180	Kab. Timor Tengah Selatan	0.248649
Kab. Belu	-0.094797	Kab. Timor Tengah Utara	0.109678
Kab. Ende	0.161727	Kota Kupang	-0.206606
Kab. Flores Timur	0.145820	Kab. Rote Ndao	-0.057369
Kab. Kupang	0.059626	Kab. Manggarai Barat	-0.226076
Kab. Lembata	0.069112	Kab. Nagekeo	0.079512
Kab. Manggarai	-0.044230	Kab. Sumba Barat Daya	0.079180
Kab. Ngada	0.063192	Kab. Sumba Tengah	-0.306674

(dilanjutkan pada halaman 685)

(lanjutan halaman 684)

Kab. Sikka	0.055263	Kab. Manggarai Timur	-0.040373
Kab. Sumba Barat	-0.133584	Kab. Sabu Raijua	0.022976
Kab. Sumba Timur	0.094882	Kab. Malaka	-0.201086

Pada teknik estimasi dengan menggunakan model terbaik yakni *Fixed Effect* dari data panel juga dapat melihat perbedaan 22 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola belanja daerahnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui hasil koefisien (intersep) antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki intersep tertinggi sebesar 0.248649 atau 24 persen, hal ini berarti jika ada perubahan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk, baik antar daerah maupun antar waktu maka Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan pengaruh individu sebesar 0.248649 atau 24 persen, tingginya intersep yang pada Kabupaten Timor Tengah Selatan disebabkan karena Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten dengan belanja daerah tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Tengah merupakan Kabupaten dengan intersep terendah sebesar -0.306674 atau -30 persen hal ini berarti jika ada perubahan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan jumlah penduduk, baik antar daerah maupun antar waktu maka pada Kabupaten Sumba Tengah kurang mendapatkan pengaruh individu sebesar 30%.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian dari metode Fixed Effect didapatkan nilai Prob (F-statistic) didapatkan hasil sebesar 0.000000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 di terima. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) Dan Jumlah Penduduk (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah (Y) provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji T (Parsial).

Tabel 6. Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Kriteria
C	7.345655	0.554655	13.24364	0.0000	Signifikan
Log(X1?)	0.160952	0.018066	8.909258	0.0000	Signifikan
Log(X2?)	0.012539	0.015171	0.826518	0.4109	Tidak signifikan
Log(X3?)	0.212909	0.012710	16.75064	0.0000	Signifikan
Log(X4?)	0.178226	0.046858	3.803542	0.0003	Signifikan

Berdasarkan hasil dari regresi data dapat diketahui bahwa pajak daerah (X1), berpengaruh signifikan, retribusi daerah (X2) berpengaruh tidak signifikan, dana alokasi khusus (X1) berpengaruh signifikan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan.

Koefisien Determinasi R-square (R^2)

Nilai R-square sebesar 0.980407 atau 98 persen. Nilai tersebut merupakan nilai yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98 persen dan 2 persen lainnya

dijelaskan oleh variabel di luar model, nilai 98 persen merupakan nilai yang lebih besar dari 50 persen hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

1. Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Handiyani & Nuraina, 2012) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun” dengan hasil penelitian pajak daerah dan dana aloksi khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun.

Berdasarkan hasil penelitian pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019 memberikan pengaruh sebesar 16 % kepada belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini merupakan kondisi yang cukup baik hal, ini dikarena pajak daerah yang merupakan hasil pendapatan asli daerah yang dikontribusi langsung oleh masyarakat, adanya pengaruh yang baik ini memberikan indikasi bahwa pemerindah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola pengumpulan pajak dari masyarakat secara efektif pemerindah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur harus bisa mempertahankan kondisi ini dan juga harus bisa meningkatkan pendapatan pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap belaja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ikut serta meningkat.

2. Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daeah

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. hal ini sejalan dengan penelitianterdahulu yang dilakukan oleh (Laksono & Subowo, 2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusu Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah” dengan hasil penelitian pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya memberikan pengaruh sebesar 0,0125 % terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai tersebut merupakan nilai yang sangat kecil hal menyebabkan apabali terjadi kenaikan pada retribusi maka tidak akan berpengaruh terhadap belanja daerah dan sebaiknya jika terjadi penurunan terhadap retribusi maka belanja daerah tidak mengalami penurunan. Menurut (Laksono & Subowo, 2014), retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki pendapatan retribusi daerah yang rendah dikarenakan kurangnya pengendalian sumber-sumber pendapatan asli daerah, seharusnya setiap daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui upaya (ekstensifikasi) yaitu peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi dimana retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah hal ini merupakan kondisi yang sangat buruk karena retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang dikontribusi langsung oleh masyarakat. Hal ini juga merupakan kondisi yang mencerminkan bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kekurangan barang publik karena, retribusi merupakan pungutan pemerintah daerah dibebankan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan manfaat yang akan diterima secara langsung bagi pengguna jasa tersebut. Kurangnya penyediaan barang publik pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat mempengaruhi perolehan pendapatan retribusi, karena mengingat retribusi hanya dibebankan pada masyarakat yang hendak merasakan jasa atau pun barang publik yang disediakan masyarakat, jika Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin meningkatkan pendapatan retribusi seharusnya pemerintah mengalokasikan belanja daerah lebih besar untuk menyediakan jasa guna meningkatkan retribusi.

3. Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhammad et al., 2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” hasil dari penelitian ini, PAD, DAU, DAK, OTSUS berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Pengaruh positif dan signifikan yang terjadi pada dana alokasi khusus menyebabkan jika terjadi kenaikan pada dana alokasi khusus maka belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada dana alokasi khusus maka belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan mengalami penurunan. Terjadinya kenaikan pada dana alokasi khusus sangat baik terhadap pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi khusus untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan yang sesuai dengan prioritas nasional, namun dampak buruknya dana alokasi khusus yang tinggi dapat mengakibatkan suatu daerah tidak mandiri karena hal ini mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.

4. Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 – 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ivoni Ike Liando & Hermanto, 2017) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur” hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan Flypaper Effect tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah adalah sebesar 17% pengaruh positif dan signifikan yang terjadi pada jumlah penduduk menyebabkan jika terjadi kenaikan pada dana jumlah penduduk maka belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada dana jumlah penduduk maka belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan mengalami penurunan. Pada dasarnya penduduk merupakan faktor utama penggerak ekonomi disuatu wilayah hal ini disebabkan penduduk dapat menjadi konsumen dan produsen itu sendiri semakin banyak dan baik kualitas penduduk disuatu wilayah maka akan membuat wilayah tersebut berkembang dengan pesat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pengujian data variabel pajak daerah menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pengaruh sebesar 16% hal ini merupakan kondisi yang baik karena mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pengumpulan pajak daerah, variabel retribusi daerah menunjukkan adanya pengaruh positif, tidak signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pengaruh terhadap belanja daerah sebesar 1,25% nilai tersebut merupakan nilai yang sangat kecil, hal ini memberikan indikasi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kekurangan jasa pelayanan publik.

Berdasarkan hasil dari analisis dan pengujian data variabel dana alokasi khusus menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi 21% persen angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dan mencerminkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap anggaran dana dari pemerintah pusat, variabel jumlah penduduk menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini dapat diketahui dari perolehan nilai. khusus menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi 21% persen angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dan mencerminkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap anggaran dana dari pemerintah pusat, variabel jumlah penduduk menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini dapat diketahui dari perolehan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, D., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Anwar, S., & Mohammad, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50-56
- Hadiyanto, D., Susiswo, S., Patimah, S., Nainggolan, H., & Ernayani, R. (2020). The Effect Of Local Taxes, Regional Retribution, And, Other Legal District Own Source Revenues On The Increase Of District Own Source Revenue. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(1), 1-3
- Handiyani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 1-12
- Kurniaawan, P., & Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Laksono, B. bowo, & Subowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 458-465
- Liando, Ivoni Ika, & Hermanto, S. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1-22.
- Muhammad, I., Tarmizi, A., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 5(1), 1-13
- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press Yogyakarta.
- Wulandari, A. P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli daerah*. CV BUDI UTAMA.
- Zuraida, I. (2013). *Tenik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika.